

ANALISIS KOLABORASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (Studi Kasus Di Desa Enonapi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Silvester Nusa¹, Dafyar Eliadi Hardian², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118
E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kolaboratif antar lembaga dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Desa Enonapi, Kabupaten Timor Tengah Selatan. PAUD HI dipandang sebagai pendekatan strategis dalam mewujudkan layanan dasar anak yang menyeluruh, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Fokus utama penelitian adalah menggali bagaimana kolaborasi aktor lokal, kelembagaan desa, dan intervensi lintas sektor mendorong implementasi PAUD HI, serta menelaah tantangan dan kesenjangan yang muncul dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) serta pendekatan tematik dengan koding terbuka dan aksial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD HI telah dilembagakan melalui Peraturan Desa dan pembentukan Sub Gugus Tugas PAUD HI. Kolaborasi antar lembaga seperti satuan PAUD, Posyandu, BKB, KPAD, pemerintah desa, dan mitra pembangunan berjalan aktif, meskipun masih bersifat informal dan bergantung pada inisiatif eksternal. Praktik seperti parenting lintas gender, pemanfaatan pangan lokal, Posyandu Remaja, dan edukasi kesehatan menunjukkan perubahan positif terhadap pola pengasuhan dan layanan anak usia dini. Namun, tantangan utama meliputi ketimpangan dukungan terhadap lembaga PAUD berstatus negeri, belum optimalnya koordinasi formal lintas sektor, dan rendahnya literasi program di kalangan pelaksana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAUD HI di Desa Enonapi telah tumbuh sebagai ekosistem layanan berbasis komunitas, namun belum sepenuhnya mapan secara kelembagaan. Diperlukan penguatan regulasi operasional, rencana aksi desa yang terstruktur, serta mekanisme koordinasi dan evaluasi lintas sektor agar model kolaborasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: PAUD HI, Kolaborasi Antar Lembaga, Desentralisasi Pendidikan, Pengasuhan Komunitas, Kabupaten TTS.

Abstract

This study aims to analyze collaborative practices between institutions in the provision of Holistic and Integrative Early Childhood Education (HI PAUD) services in Enonapi Village, South Central Timor Regency. HI PAUD is viewed as a strategic approach to achieving comprehensive basic child services, including education, health, nutrition, care, and child protection. The main focus of the study is to explore how collaboration between local actors, village institutions, and cross-sectoral interventions promotes the implementation of HI PAUD, as well as to examine the challenges and

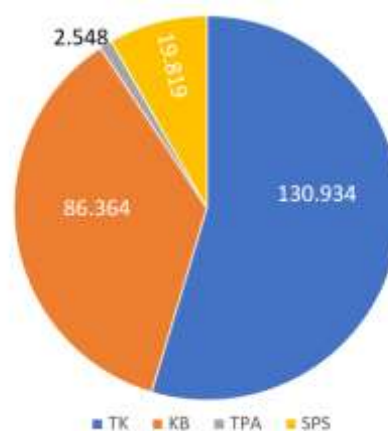
gaps that arise in practice. The research method used is a qualitative case study, with data collection techniques including in-depth interviews, participant observation, and document analysis. Data were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014) and a thematic approach with open and axial coding. The results indicate that HI PAUD has been institutionalized through Village Regulations and the establishment of a HI PAUD Sub-Task Force. Collaboration between institutions such as PAUD units, Integrated Service Posts (Posyandu), BKB, KPAD, village government, and development partners is active, although still informal and dependent on external initiatives. Practices such as cross-gender parenting, the use of local foods, the Youth Integrated Service Post (Posyandu Remaja), and health education have shown positive changes in early childhood care patterns and services. However, key challenges include unequal support for state-owned early childhood education institutions (PAUD), suboptimal formal cross-sectoral coordination, and low program literacy among implementers. This study concludes that HI PAUD in Enonapi Village has grown as a community-based service ecosystem, but is not yet fully established institutionally. Strengthening operational regulations, a structured village action plan, and cross-sectoral coordination and evaluation mechanisms are needed to ensure a sustainable and inclusive collaborative model.

Keywords: HI PAUD, Inter-Institutional Collaboration, Educational Decentralization, Community Care, South Central Timor Regency.

A. Pendahuluan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan tahap pendidikan awal yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar perkembangan anak secara optimal. Masa anak usia dini juga merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pada masa inilah fondasi tumbuh kembang seorang anak dibentuk, baik dari sisi fisik, kognitif, sosial emosional, maupun spiritual. Oleh sebab itu, perhatian terhadap anak usia dini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terpadu.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan sektor ini adalah jumlah satuan pendidikan PAUD yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 1. Infografik Rincian Satuan PAUD Secara Nasional.

Data satuan PAUD yang disajikan di atas merupakan hasil pendataan Dapodik per tahun ajaran 2023/2024 dan mencerminkan sebaran lembaga-lembaga yang melayani pendidikan anak usia dini melalui berbagai jalur, baik formal maupun nonformal, seperti Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 130.934 unit, Kelompok Bermain (KB) 86.364 unit, Taman Penitipan Anak (TPA) 2.548 unit, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) 19.819 unit. Penyajian data ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perencanaan kebijakan dan program peningkatan layanan PAUD secara nasional.

Sementara jumlah Satuan PAUD di Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana Data Induk Satuan Pendidikan 2024 terdiri dari Taman Kakak-Kanak sebanyak 1.846 unit, Kelompok Bermain sebanyak 3.921 unit, Taman Penutupan Anak 25 unit dan Satuan PAUD Sejenis sebanyak 347 unit. Di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan sumber data referensi DAPODIK 2024 terdiri dari Taman Kanak-Kanak sebanyak 162 unit, Kelompok Bermain sebanyak 510 unit, Taman Penitipan Anak sebanyak 2 unit dan Satuan PAUD Sejenis sebanyak 2 unit. Sementara di Kecamatan Kie terdiri dari Taman Kanak-Kanak 9 unit dan Kelompok Bermain 22 unit.

Data jumlah satuan PAUD di atas memberikan gambaran nyata mengenai capaian dan sebaran layanan pendidikan anak usia dini di wilayah Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di tingkat Kecamatan Kie. Dengan dominasi satuan KB dan TK, serta keberadaan TPA dan SPS yang meskipun masih terbatas namun memiliki peran strategis. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses layanan PAUD. Namun demikian, pemerataan mutu layanan, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan sinergi antar-lembaga perlu terus ditingkatkan agar setiap anak usia dini, tanpa memandang latar belakang wilayah atau sosial ekonomi, dapat memperoleh pendidikan yang holistik dan berkualitas. Data ini diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak usia dini sesuai dengan kewenangannya masing-masing agar setiap anak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

Masa usia dini merupakan periode paling krusial dalam siklus perkembangan manusia. Pada usia 0–6 tahun, otak anak berkembang sangat pesat, mencapai sekitar 90% kapasitas otak dewasa. Menurut Jean Piaget, pada tahap pra-operasional, anak belajar melalui pengalaman konkret, interaksi sosial, dan aktivitas simbolik. Karena itu, pendidikan anak usia dini tidak dapat dibatasi pada aspek akademik semata, tetapi harus dilakukan secara holistik dan integratif, meliputi stimulasi kognitif, pengasuhan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Secara kebijakan, Indonesia telah merespons kebutuhan ini melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Perpres ini menekankan pentingnya kerja lintas sektor dan multipihak, dari tingkat pusat hingga desa, guna menjamin layanan PAUD HI yang menyeluruh, simultan, dan berkelanjutan.

Kolaborasi lintas sektor merupakan kerja sama antara organisasi atau lembaga dari berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemerintah desa untuk mencapai tujuan bersama yang kompleks. Emerson menegaskan bahwa "kolaborasi

lintas sektor menciptakan nilai kolektif melalui proses dialog, perencanaan bersama, pengambilan keputusan bersama, dan tindakan bersama.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), kolaborasi didefinisikan sebagai: "Proses pengaturan dan tata kelola di mana aktor-aktor dari berbagai sektor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda terlibat dalam interaksi yang konstruktif untuk mencapai tujuan bersama melalui proses yang disepakati bersama." Kolaborasi lintas sektor yang efektif menuntut adanya kesamaan tujuan, kepercayaan timbal balik, komunikasi yang berkelanjutan, serta mekanisme untuk pengambilan keputusan bersama. Pernyataan ini menggambarkan fondasi dari kolaborasi antarlembaga, terutama ketika masing-masing pihak membawa latar belakang, kepentingan, dan wewenang yang berbeda. Dalam konteks PAUD HI, kolaborasi antar lembaga seperti satuan PAUD, Posyandu, BKB, pemerintah desa, dan lembaga perlindungan anak tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kejelasan tujuan bersama dan kepercayaan antarpihak. Komunikasi yang terbuka dan adanya forum atau mekanisme pengambilan keputusan bersama menjadi penentu keberhasilan integrasi layanan.

Teori ini memberikan dasar analisis dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana unsur-unsur tersebut terbentuk di Desa Enonapi dan bagaimana hal itu mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAUD HI secara kolaboratif. Teori ini juga menjelaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan struktur kerja sama yang jelas, kepemimpinan kolektif, serta komunikasi yang berkelanjutan. Teori ini sangat relevan untuk menelaah praktik kolaboratif antar lembaga seperti PAUD, Posyandu, BKB, dan pemerintahan desa dalam membangun layanan integratif bagi anak usia dini.

Teori ekologi perkembangan anak yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner (1979) menggambarkan bahwa tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang saling terkait dan berlapis-lapis. Gambar yang disajikan memperlihatkan lima sistem utama yang membentuk ekosistem kehidupan anak, dimulai dari yang paling dekat hingga ke yang paling luas. Pertama, Sistem Mikro (Microsystem). Ini adalah lingkungan yang paling dekat dengan anak dan tempat interaksi langsung terjadi secara rutin. Dalam konteks PAUD, sistem mikro mencakup: keluarga/orang tua, sebagai tempat utama anak tumbuh dan dibentuk sejak dini. Sekolah atau lembaga PAUD, tempat anak belajar dan berinteraksi dengan guru. Tempat penitipan anak, kader Posyandu, dan lingkungan bermain. Lingkungan ini memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan perilaku, nilai, dan identitas anak. Oleh karena itu, kualitas hubungan antara anak dan pelaku di lingkungan mikro sangat menentukan arah perkembangan anak.

Kementerian PPN/Bappenas (2014) menyatakan bahwa "PAUD HI bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar anak secara menyeluruh melalui layanan yang terintegrasi dan berbasis komunitas."

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015) menyebutkan bahwa dengan merujuk pada Perpres Nomor 60 Tahun 2013, maka Program PAUD-HI menjadi tanggungjawab semua pihak sedangkan pembinaan Satuan PAUD-nya menjadi tanggungjawab pihaknya. Kemendikbud berpendapat kolaborasi antarlembaga atau lintas sektor instansi pemerintah, swasta dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan PAUD-HI. Soedijarto (2009), menyatakan bahwa pendidikan

anak usia dini harus memfasilitasi seluruh potensi anak secara harmonis dan terpadu. Oleh karena itu, PAUD HI harus dikelola dengan pendekatan yang tidak sektoral, melainkan menyatukan berbagai aspek kehidupan anak secara sinergis. Lebih lanjut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa satuan layanan PAUD HI adalah wadah kolaborasi antar layanan yang mencakup satuan PAUD, posyandu, BKB, serta unsur perlindungan dan kesejahteraan anak dalam satu sistem berbasis desa.

Sementara itu menurut UNESCO (2006) dalam dokumen *Strong Foundations: Early Childhood Care and Education*, PAUD HI adalah pendekatan pengembangan anak usia dini yang menyeluruh, mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara terintegrasi: "ECCE is more than preparation for primary school. It aims at the holistic development of a child's social, emotional, cognitive and physical needs." Dari permasalahan tersebut, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan PAUD Holistik Integratif di Desa Enonapi, Kecamatan Kie?
2. Bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan untuk memperkuat efektivitas kolaborasi antar sektor dalam pengelolaan PAUD Holistik Integratif di tingkat desa?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana orang memaknai pengalaman atau situasi sosial tertentu, dan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan hasilnya. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam dinamika pengelolaan PAUD Holistik Integratif berbasis kolaborasi antar lembaga di tingkat desa. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik nyata, tantangan, serta strategi yang digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelenggarakan layanan PAUD HI di Desa Enonapi, dengan informan yang diwawancarai sebanyak 7 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 11 bulan (Sebelas) bulan yaitu dimulai dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Berdasarkan hasil wawancara dan triangulasi data, proses kolaborasi antar lembaga di Desa Enonapi telah menunjukkan adanya bentuk kerja sama formal dan informal. Kolaborasi tersebut didukung dengan adanya regulasi berupa Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas PAUD HI. Struktur kolaborasi mencakup berbagai aktor, yaitu pemerintah desa, guru PAUD, kader Posyandu, kader BKB, dan lembaga mitra seperti Yayasan Plan International Indonesia. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal inklusivitas dan partisipasi. Guru dari PAUD formal (negeri) mengungkapkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam forum desa karena status lembaga mereka. Ini menunjukkan adanya eksklusi institusional yang menghambat prinsip kolaborasi menyeluruh.

Proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di Tingkat Desa Enonapi berawal dari Yayasan Plan International Indonesia Program Area Timor yang melakukan sosialisasi PAUD-HI di desa itu. Melalui Pemerintah Desa, Plan mengundang semua pihak baik guru PAUD, kader posyandu, tenaga Kesehatan desa, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, TP PKK, perwakilan anak dan KPAD atau Kelompok Perlindungan Anak Desa. “Pada saat sosialisasi PAUD-HI kami mengundang semua unsur masyarakat agar memahami maksud dan tujuan program. Ternyata untuk melaksanakannya perlu melibatkan semua pihak baik itu kader posyandu, guru PAUD, kelompok perlindungan anak desa atau KPAD, tenaga Kesehatan desa, TP PKK dan unsur lainnya. Inilah awal dari pembentukan Sub Gugus Tugas PAUD-HI. Pada acara sosialisasi ini kami juga menyusun rencana tindaklanjut kegiatan di semua layanan. Masing-masing layanan membuat perencanaan.” (Arni Boimau, Kepala Desa Enonapi.).

Hasil wawancara dari informan Arni Boimau, Kepala Desa Enonapi, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Berdasarkan regulasi ini selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 2/1/2025 tentang Pembentukan Tim Sub Gugus Tugas PAUD-HI. Dalam SK Kepala Desa Enonapi tersebut secara jelas menguraikan peran setiap layanan yang terdiri dari layanan kesehatan dan gizi, layanan pendidikan, layanan pengasuhan, layanan kesejahteraan dan layanan perlindungan anak.

“Kami sudah tetapkan Perdes Nomor 6 Tahun 2025 tentang PAUD-HI dan kami juga sudah terbitkan dan SK Sub Gugus Tugas PAUD HI Nomor 2/1/2025 tentang Sub Gugus Tugas PAUD-HI Desa Enonapi. Kebijakan ini kami buat sebagai dasar penyelenggaraan PAUD-HI di desa kami.” (Arni Boimau, Kepala Desa Enonapi.). Pernyataan Kepala Desa ini diperkuat oleh Kader BKB Welmince Tamonob, Kader Posyandu Karolina Abi dan Guru PAUD pada TK Nekmese Femi A. Tualaka, S.Pd, yang menyatakan bahwa di Desa Enonapi telah ada Perdes dan SK Sub Gugus Tugas PAUD-HI. Baik di Perdes maupun di SK Kepala Desa, terdapat uraian peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi data antar informan (triangulasi sumber).

Hasil wawancara tersebut juga sesuai dengan dokumen Perdes PAUD HI Nomor 6 Tahun 2025 maupun SK Kepala Desa Nomor 2/1/2025 yang menyebutkan layanan kesehatan dan gizi, layanan pendidikan, layanan pengasuhan, layanan kesejahteraan dan layanan perlindungan anak (triangulasi teknik). Dalam dua dokumen tersebut secara jelas mengatur peran masing-masing pihak.

Welmince Tamonob, Kader BKB menyampaikan; “kami sepakat kapan waktunya untuk latihan atau role play sehingga saat pertemuan dengan orang tua kami sudah terbiasa dan percaya diri dalam memfasilitasi pertemuan BKB. Setiap layanan punya tugas atau peran masing-masing. Kalau kami di BKB itu ada yang sebagai Kader Bantu, Kader Inti, dan Kader Piket.” (Kader BKB,). Pernyataan ini menunjukkan adanya mekanisme koordinasi yang disepakati bersama, yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pembagian peran fungsional yang jelas.

Anak-anak TK Nekmese hingga saat ini tidak pernah mendapatkan PMT yang bersumber dari dana desa. Pengelola dan Guru TK pun hanya bisa berpasrah karena

informasi yang mereka peroleh kabarnya PMT hanya diberikan kepada anak yang kurang gizi atau stunting. Pihak TK Nekmese juga mengaku pasrah pada keadaan. Mereka berharap kepada Dinas PMD atau Dinas Pendidikan Kabupaten yang menjelaskan saja terkait peran Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan PAUD di desa dan bagaimana hubungannya dengan sekolah negeri seperti TK yang berstatus negeri.

Di balik kesedihan itu semua, Guru TK tetap optimis bahwa ke depan akan ada komunikasi yang lebih baik karena keberadaan TK Nekmese dalam wilayah Desa Enonapi dan anak-anak yang diasuh pun adalah anak-anak dari warga Desa Enonapi. Kehadiran TK ini memberikan banyak perubahan. Awalnya anak kurang percaya diri tetapi perkembangan selanjutnya sudah percaya diri. Anak lebih cerdas, pintar dan lebih sehat. Guru Tk Nekmese berpesan agar ke depan pihak Pemerintah Desa tidak melupakan TK Nekmese dalam perencanaan dan penganggarannya.

Fakta yang diuraikan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan eksklusivitas kebijakan desa terhadap lembaga pendidikan formal. TK Negeri diposisikan di luar sistem, padahal anak-anak yang dididik di TK Nekmese adalah anak-anak warga Desa Enonapi. Ketidakterlibatan ini berpotensi melemahkan ekosistem kolaboratif dan menimbulkan ego sektoral antara pendidikan formal dan layanan komunitas.

Sementara itu, koordinasi antar lembaga di tingkat kabupaten juga menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Kabupaten TTS telah membentuk Gugus Tugas PAUD HI melalui SK Bupati, namun pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan sistem koordinasi yang terjadwal dan berkelanjutan. Saat dimintai tanggapan terkait koordinasi lintas OPD, Sekretaris Bappeda, Jan P. Mela, S.STP., M.Si, mengungkapkan: "Belum ada Rencana Aksi PAUD HI yang disusun bersama. Perencanaan masing-masing instansi masih dilakukan sendiri-sendiri. Koordinasi hanya terjadi kalau ada kegiatan dari UNICEF atau mitra." Hal serupa juga terjadi di sektor perlindungan anak. KPAD Desa Enonapi telah dibentuk, namun pelaksanaannya belum berjalan aktif karena ketuanya berada di luar wilayah. Koordinasi antara KPAD dengan lembaga lain seperti PAUD, Posyandu dan BKB hampir tidak ada. Kader Posyandu, Karolina Abi, menyebutkan hingga saat ini sangat jarang melakukan pertemuan yang melibatkan semua unsur layanan dalam PAUD-HI.

Dalam perspektif teori Collaborative Governance (Emerson et al., 2012), kolaborasi ini telah mencerminkan sebagian unsur principled engagement seperti komunikasi dan pembagian peran. Namun, kelemahan terlihat pada aspek inclusivity dan mekanisme evaluasi bersama.

Dari sisi administrasi pendidikan, kolaborasi ini merupakan implementasi dari prinsip koordinasi, pembagian tugas, dan kerja sama antar lembaga (Siagian, 2003). Selain itu, berdasarkan konsep PAUD HI dari Perpres No. 60 Tahun 2013, upaya integratif di Enonapi telah mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak. Namun, keterbatasan koordinasi dan tidak meratanya pelibatan lembaga menjadi tantangan dalam penerapan konsep tersebut secara optimal.

Dalam konteks POSDCORB (Gulick, 1937), fungsi perencanaan, organizing, dan directing telah dijalankan melalui musyawarah, peraturan, dan pembentukan struktur kolaboratif. Akan tetapi, fungsi staffing, coordinating, dan reporting masih menghadapi

kendala akibat belum adanya SOP, dokumen aksi lintas sektor, dan rendahnya kapasitas teknis.

Model kolaborasi ini juga mencerminkan prinsip mesosistem dalam teori ekologi Bronfenbrenner, di mana hubungan antaraktor mikro (PAUD, Posyandu, BKB, keluarga) saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap pengembangan anak usia dini.

2. Strategi dan Upaya Memperkuat Efektivitas Kolaborasi PAUD HI. Kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di Desa Enonapi tidak terbentuk secara instan. Berbagai strategi dan upaya telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk memperkuat efektivitas kerja sama antar lembaga dan sektor. Upaya ini terlihat dari inisiatif kelembagaan, pelatihan lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan dari mitra pembangunan.

Pertama, dari sisi kelembagaan, pemerintah desa telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2025 tentang PAUD HI dan membentuk Tim Sub Gugus Tugas dengan terbitnya SK Kepala Desa Nomor 2/1/2025 yang terdiri dari lima bidang layanan yakni pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak dan kesejahteraan). Struktur ini memberi kejelasan peran dan memperkuat koordinasi antar layanan. Seperti dijelaskan oleh Kepala Desa Enonapi, Arni Boimau: "Kami bentuk sub gugus tugas PAUD HI sesuai bidangnya, ada kesehatan, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak. Mereka semua kami libatkan supaya saling dukung." Komitmen dan rasa saling percaya merupakan pilar utama dalam membangun tata kelola kolaboratif yang efektif, sebagaimana dijelaskan dalam dimensi *shared motivation* oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Dalam konteks PAUD Holistik Integratif (PAUD-HI) di Desa Enonapi, kedua elemen ini menjadi landasan utama terbentuknya kerja sama lintas sektor, terutama di antara pelaku layanan dasar seperti kader BKB, kader Posyandu, guru PAUD, dan pemerintah desa. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen kolektif belum menyentuh semua pihak, terutama lembaga pendidikan formal yang berada di luar struktur komunitas desa. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan partisipatif dan tantangan dalam membangun kepercayaan lintas sektor secara menyeluruh.

Dalam perspektif administrasi pendidikan, kondisi ini memperlihatkan pentingnya membangun sistem kerja sama yang tidak hanya berbasis relasi personal, melainkan juga didukung oleh mekanisme koordinasi yang terjadwal dan inklusif. Kolaborasi yang kuat menuntut tidak hanya kepercayaan antarpelaku, tetapi juga sistem yang memastikan partisipasi semua lembaga secara merata. Dalam kerangka teori administrasi pendidikan, komitmen ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari fungsi *motivating* dan *implementing*, yaitu daya dorong dari dalam yang menggerakkan individu dan kelompok untuk menjalankan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Sondang P. Siagian (2003) menekankan pentingnya kerja sama yang didorong oleh rasionalitas dan kesadaran kolektif. Apa yang terjadi di Desa Enonapi menunjukkan bahwa pelaku PAUD-HI telah membangun komitmen sebagai energi sosial untuk memperkuat kolaborasi, meskipun belum seluruhnya ditopang oleh sistem formal yang kuat.

Namun demikian, komitmen yang tinggi dari sebagian pelaku masih bersifat parsial dan belum merata. Masih terdapat perbedaan persepsi antar lembaga mengenai pentingnya keterlibatan bersama. Guru TK Negeri Nekmese, misalnya, merasa tidak

dianggap sebagai bagian dari sistem kolaborasi desa, sehingga komitmen mereka tidak berkembang maksimal. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius, karena kolaborasi tidak akan berhasil jika komitmen hanya muncul dari satu sisi, sementara sisi lainnya merasa terasingkan atau tidak dilibatkan. Maka, komitmen harus dipahami dan dibangun sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar inisiatif pribadi atau kelompok tertentu. Di tengah dinamika kolaborasi yang telah terbangun, penguatan kapasitas bersama (*capacity for joint action*) menjadi keharusan. Salah satu strategi yang dapat memperkuat efektivitas kolaborasi adalah pembentukan sekretariat tetap Sub Gugus Tugas PAUD-HI di tingkat desa. Sekretariat ini tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat koordinasi lintas layanan, penyimpanan data, dokumentasi kegiatan, dan pelaporan. Keberadaan sekretariat akan menjembatani komunikasi antara lembaga pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak serta meningkatkan akuntabilitas kolaboratif. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik yang menekankan pentingnya *structural support* dalam menunjang fungsi koordinasi dan kontrol (Gulick, 1937). Selain struktur kelembagaan, keberhasilan kolaborasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Temuan menunjukkan bahwa sebagian kader, guru PAUD, dan pengurus KPAD belum mendapatkan pelatihan berjenjang yang relevan dengan pendekatan PAUD HI. Rendahnya kapasitas teknis ini berdampak pada kesenjangan pemahaman lintas sektor dan menghambat pelaksanaan kegiatan yang bersifat integratif. Karena itu, pelatihan berjenjang dan lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk membentuk pemahaman bersama dan memperkuat kerja kolektif. Hal ini mendukung konsep *shared knowledge* dalam kerangka Emerson et al. (2012) sebagai salah satu pilar dari *capacity for joint action*.

Fungsi monitoring dan evaluasi (*monev*) kolaborasi PAUD-HI juga belum berjalan optimal. Tidak ditemukan bukti adanya instrumen evaluasi yang digunakan secara rutin oleh Sub Gugus Tugas atau oleh pemerintah desa untuk menilai capaian masing-masing layanan. Minimnya *monev* menyebabkan kesulitan dalam menilai dampak kolaborasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dalam kerangka administrasi pendidikan, absennya sistem evaluasi mencerminkan lemahnya fungsi reporting dan review, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk perbaikan berkelanjutan (Gulick, 1937). Membangun sistem *monev* kolaboratif lintas sektor akan menjadi langkah penting untuk menjamin efektivitas dan kesinambungan program.

Penguatan struktur kolaborasi juga menuntut adanya sistem insentif dan penghargaan bagi para pelaku layanan, terutama kader dan guru PAUD yang selama ini bekerja melebihi kapasitasnya. Di lapangan, ditemukan bahwa beberapa kader belum menerima insentif tetap, dan pengelola PAUD belum mendapatkan tunjangan yang memadai meskipun memegang peran penting dalam pembentukan karakter anak. Ketimpangan ini berpotensi mengurangi semangat pengabdian dan keberlanjutan kolaborasi. Oleh sebab itu, Dana Desa perlu diarahkan tidak hanya untuk kegiatan fisik, tetapi juga insentif operasional yang terencana dan berkelanjutan.

Salah satu strategi penguatan kapasitas yang mulai terlihat adalah munculnya inisiatif lokal dalam menciptakan inovasi layanan. Misalnya, integrasi kelas parenting dengan kegiatan posyandu telah menjadi praktik baik di beberapa dusun, di mana orang tua tidak

hanya mendapatkan layanan kesehatan, tetapi juga materi pengasuhan dan stimulasi. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dapat berkembang jika diberikan ruang untuk inovasi berbasis kebutuhan lokal. Pemerintah desa dan mitra pembangunan dapat mendorong praktik-praktik baik ini untuk direplikasi dan dikembangkan dalam skala yang lebih luas melalui lomba inovasi desa atau program desa model PAUD-HI.

D. Kesimpulan

1. Proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan PAUD HI di Desa Enonapi telah berjalan melalui pendekatan struktural dan kultural. Pembentukan Sub Gugus Tugas PAUD HI dan penetapan Peraturan Desa menjadi dasar hukum yang mendukung mekanisme kerja sama antar lembaga seperti PAUD, Posyandu, BKB, KPAD, dan pemerintah desa. Kolaborasi diwujudkan dalam musyawarah desa, penyusunan jadwal kegiatan bersama, dan pengambilan keputusan yang partisipatif. Namun demikian, inklusivitas masih menjadi tantangan, terutama bagi lembaga formal seperti PAUD Negeri yang belum sepenuhnya terlibat aktif. berperan penting dalam mendukung kinerja pelaksanaan Program P4GN di BNN Kota Tangerang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya efektivitas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Penyampaian pesan tentang bahaya narkoba dan program P4GN belum sepenuhnya merata dan konsisten di semua lapisan masyarakat, sehingga kesadaran publik masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih masif, kreatif, dan berbasis komunitas. komitmen dan kepercayaan antar pihak dalam menjalankan program PAUD HI cukup kuat, khususnya di antara pelaku layanan komunitas seperti kader dan guru PAUD swasta. Praktik saling bantu, koordinasi informal, dan kesadaran bersama atas pentingnya tumbuh kembang anak menunjukkan adanya motivasi bersama yang tumbuh dari pengalaman kerja kolektif. Meski demikian, belum semua aktor merasa memiliki peran yang setara, dan hubungan antar lembaga formal belum sepenuhnya harmonis.

2. Struktur, peran, dan sumber daya untuk mendukung kolaborasi PAUD HI telah tersedia dan berfungsi, walaupun masih terbatas. Dana Desa digunakan sebagai sumber pendanaan utama, dan peran masing-masing lembaga dijelaskan dalam SK Gugus Tugas. Namun, kapasitas SDM dan sarana-prasarana masih perlu ditingkatkan agar kolaborasi dapat berjalan secara mandiri tanpa ketergantungan pada mitra eksternal. tantangan kolaborasi muncul dari beberapa faktor: belum adanya forum koordinasi tetap di tingkat kabupaten, tingginya ketergantungan terhadap fasilitator luar, rendahnya partisipasi masyarakat, serta jadwal kegiatan yang tumpang tindih. Rotasi kepala desa dan kader tanpa proses alih peran juga menghambat kesinambungan pelaksanaan program. strategi yang dilakukan untuk memperkuat kolaborasi meliputi pelatihan lintas sektor, penggunaan media digital untuk koordinasi, penyusunan dokumen perencanaan desa yang inklusif, dan penguatan regulasi lokal. Meskipun strategi ini efektif dalam jangka pendek, keberlanjutan kolaborasi masih memerlukan kebijakan sistemik dan peningkatan kapasitas kelembagaan di semua level.

Referensi

Buku

- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Burhanuddin. (2008). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Castetter, W. B. (1996). *The Human Resource Function in Educational Administration* (6th ed.). Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (edisi keempat, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). Pustaka Pelajar.
- Dewi, R. A. (2022). *Model kolaborasi dalam PAUD HI di Kecamatan Godean*. DIY.
- Direktorat Pembinaan PAUD. (2020). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fayol, H. (1916). *General and Industrial Management* (C. Storrs, Trans.). London: Pitman Publishing.
- Gulick, L. (1937). Notes on the theory of organization. In L. Gulick & L. Urwick (Eds.), *Papers on the Science of Administration* (pp. 3–35). New York: Institute of Public Administration.
- Gulick, L. (1937). *Notes on the Theory of Organization*. In L. Gulick & L. Urwick (Eds.), *Papers on the Science of Administration* (pp. 3–45). New York: Institute of Public Administration.
- Gulick, L., & Urwick, L. (Eds.). (1937). *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration, Columbia University.
- Hafni. (2019). *Konsep Dasar Administrasi Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Handayani, R. (2019). *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Herlina, S. (2018). *Evaluasi pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Garut*.
- Kemendikbud. (2015). *Pedoman Layanan PAUD*. Jakarta: Direktorat PAUD.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2025). *Kajian peta jalan PAUD berkualitas 2020–2025. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2014). *Pedoman Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*. Jakarta: Bappenas.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik praktis riset komunikasi: Disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Kencana.
- Kurniawan, H. (2019). *Teori Administrasi dan Implementasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lestari, T. (2020). *Implementasi PAUD HI berbasis desa di Kabupaten Sleman*.
- Mahmud, H. (2015). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murdiyanto. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Pustaka Ilmu.
- Newman, W. H. (1975). *Administrative Action: A Managerial Approach*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Cakra Books.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children* (M. Cook, Trans.). International Universities Press.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children* (M. Cook, Trans.). New York: International Universities Press. (Karya asli diterbitkan 1936)
- Purwanto, N. (2009). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak) Kemendikbud. (2019). *Kajian kesiapan pelaksanaan PAUD HI di beberapa provinsi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sagala, S. (2013). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Salmaa. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. [Nama penerbit, jika diketahui].
- Santrock, J. W. (2011). *Child Development (13th ed.)*. New York: McGraw-Hill.
- Satori, D. (1980). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: CV Armico.
- Sharma, M. P. (1966). *Public Administration: Theory and Practice*. Allahabad: Kitab Mahal.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktik Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soedijarto. (2009). *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Sofiyana, L., Putri, N. W., & Sari, D. P. (2022). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan*. CV Jejak.
- Stevan, J. (1995). *Modern Public Administration: A Systems Approach*. New York: Longman.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- The Liang Gie. (2000). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Liberty.
- UNESCO. (2010). *Early Childhood Care and Education Regional Report: Asia and the Pacific*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2012). *Integrated Early Childhood Development: A Global Strategy for Young Children*. New York: UNICEF.

Jurnal

- Astuti, T., & Nugroho, B. (2019). Pengembangan PAUD Holistik Integratif berbasis potensi lokal. *Jurnal Pendidikan Usia Dini dan Pengembangan Anak*, 4(1), 55–65.

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature. *Public Administration Review*, 66(s1), 44–55. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Hidayati, S. (2020). Implementasi Layanan PAUD HI Berbasis Desa: Studi Kualitatif di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 33–42.
- Nuraeni, N., & Nurbaeti, L. (2020). Kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Kota Bandung. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 100–110. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.476>
- Rahmawati, E. (2019). Kolaborasi Antar Sektor dalam Layanan PAUD Holistik Integratif. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8(2), 145–157.
- Saputra, I., Erialdy, E., & Eliadi, D. (2023). Pengaruh Pemenuhan Character Building, Motivasi Belajar Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Peningkatan Mutu Taruna Poltekpel Banten. *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 59–65.
- Sari, Y. W. (2017). Implementasi layanan PAUD Holistik Integratif berbasis masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 22–31.
- Simon, H. A. (1946). The Proverbs of Administration. *Public Administration Review*, 6(1), 53–67.
- Sugiyono (2024). Validitas Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Perspektif UNIS*, 9(1), 45–56. Retrieved from <https://lib.unis.ac.id/ojs/index.php/perspektif/article/view/1234>
- Sulistiyorini, R. (2018). Model kolaborasi dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 145–156.
- Widayanti, T. (2021). Strategi pemerintah desa dalam implementasi PAUD HI di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 134–143.
- Yuliana, L., & Siregar, R. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan PAUD Holistik Integratif. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 18(1), 72–84.
- Zhang, Y. (2011). The Development of Administrative Theory. *International Journal of Public Administration*, 34(1), 1–10.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Indonesia. (2023). Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Indonesia. (2020). Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.
- Indonesia. (2023). Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Indonesia. (2025). Peraturan Desa Enonapi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Indonesia. (2023). Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 85/KEP/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022-2024.
- Indonesia. (2023). Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 181/KEP/HK/2023 tentang Teknis Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Indonesia. (2025). Surat Keputusan Kepala Desa Enonapi Nomor 2/1/2025 tentang Sub Gugus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.